

Lensa Ekonomi

Volume 5, No.2. Desember 2011

**PENGARUH REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2006-2010**
Hengky Sani, Sarce Babra Awom, Mus Muallim

**ANALISIS DAMPAK BELANJA MODAL DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007-2010**
Johanes Paulus Koromath

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN
PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN MANOKWARI**
Wisnu Harry Murti, Husbianto Sudarwadi, Romy Martim Ap

**ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN KUALITAS HIDUP
SUMBER DAYA MANUSIA**
(Studi Kasus Masyarakat Asli Papua di Kampung Ingrammui
Distrik Manokwari Barat)
Betsy Anastasya Buiney, Simson Wenimom, Mus Muallim

**ANALISIS PENYEBAB PERTUMBUHAN REALISASI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN YANG SEMAKIN BERKURANG
DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2005-2009**
Jhony Maay, Martha A. C. Karethi, Rumias Alma Yap

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**
Yuyun Puji Rahayu

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (EKPD)
PROVINSI PAPUA BARAT**
Yan Pieter Karafir, Victor E. Fere, Ishak Semuel Erani, Imanda A.F.
Djuuna, Max Jondudago Tokede, Simson Wenimom

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua

Lensa Ekonomi

Volume 5. No. 2, Desember 2011

Mitra Bestari : Achmad Rochani
Rully Wurarah
Julius Ary Mollet
Victor E. Fere
Selmi Dedi

Pemimpin Redaksi : Mus Mualim

Sekretaris Redaksi : Yuyun Puji Rahayu

Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua
Jl. Gunung Salju No. 01 Amban Manokwari
98314 Telp/Fax (62) 986-211557

Lensa Ekonomi diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, dengan frekuensi terbit 2 (dua) kali setahun. Redaksi menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal atau terbitan berkala lain. Tulisan adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah untuk terbitan berkala. Redaksi berhak mengubah/memperbaiki bahasa tanpa mengubah materi tulisan. Setiap tulisan bukan cermin pandangan redaksi.

DAFTAR ISI

PENGARUH REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2006-2010 Hengky Sani, Sarce Babra Awom, Mus Muallim	108
ANALISIS DAMPAK BELANJA MODAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007-2010 Johanes Paulus Koromath	121
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MANOKWARI Wisnu Harry Murti, Hustianto Sudarwadi, Rony Martin Ap	134
ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN KUALITAS HIDUP SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Kasus Masyarakat Asli Papua di Kampung Ingramui Distrik Manokwari Barat) Betsy Anastasya Buiney, Simson Werimon, Mus Muallim	141
ANALISIS PENYEBAB PERTUMBUHAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN YANG SEMAKIN BERKURANG DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2005-2009 Jhony Maay, Martha A. C. Kareth, Rumas Alma Yap	158
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT Yuyun Puji Rahayu	168
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (EKPD) PROVINSI PAPUA BARAT Yan Pieter Karafir, Victor E. Fere, Ishak Samuel Erari, Irnanda A.F. Djuuna, Max Jondudago Tokede, Simson Werimon	188

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Yuyun Puji Rahayu*)

*) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua

Abstract

This research analysed effects of fiscal decentralization to regional development in regions dan municipality in West Papua Province. Some development indicators are used such as Human Development Index and its sub-indicators, for instance, health, education and per capita income. The purpose is to identify implications of the decentralization's degrees in each regions and municipality to socio-economic development. Secondary data used from 2007 to 2010. Development growth from each regions and municipality shows that there was limited attempt to raise PAD. Steady growth of PAD only occurred in Manokwari District.

The degree of fiscal decentralization explains that almost all regions and municipality in West Papua Province had negative DAU growth in 2010, except for Teluk Wondama District. Negative signs shows that DAU total has declined significantly. As a result, some programs might be delayed or even cancelled due to a limited budget. Among regions and municipalities in West Papua province, there are only Kaimana and Sorong Selatan Districts that have positive growth of DAK. Sorong Selatan District had the highest DBH growth in 2010 (838.88%), similar to its rapid growth which attained 97.22%. Regression result shows that there was an imbalance distribution not only of fund proportions but also of PAD between regions and municipality in West Papua Province. From seven models, there was only one model that is not significant to explain the impact of decentralization funds on the development indicators. That was a model with purchasing power parity as the respons variable. On the other hand, the rest models were significant. This means that all independent variables (DAU, DAK, DBH and PAD) collectively influenced the response indicators, except for purchasing power parity at level of significance 95%.

Keywords: *Degree of fiscal decentralization, regional income, regional disparity, economic development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat. Beberapa indikator pembangunan digunakan seperti, Indeks Pembangunan Manusia dan sub-indikatornya, indikator pendidikan dan kesehatan serta pendapatan perkapita, untuk mengetahui implikasi dari adanya desentralisasi tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk tahun 2007 sampai tahun 2010. Tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan di tiap-tiap daerah menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan nilai PAD belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah yang berwenang. Laju pertumbuhan PAD yang cukup stabil hanya ada di Kabupaten Manokwari. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat memiliki tingkat pertumbuhan DAU negatif pada tahun 2010, kecuali Kabupaten Teluk Wondama. Nilai negatif ini menunjukkan semakin berkurangnya total DAU yang dialokasikan per total pendapatan daerah. Hal ini dapat berdampak kepada terhambatnya beberapa program pembangunan karena kurangnya pembiayaan. Untuk DAK Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, hanya Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki nilai pertumbuhan positif. Untuk Kabupaten Sorong Selatan, pertumbuhan DBH-nya sangat tinggi di tahun 2010 (838,88%), searah

dengan laju pertumbuhan di Kabupaten Sorong Selatan yang mencapai 97,22%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi dana perimbangan dan PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat. Dari tujuh model regresi untuk melihat pengaruh desentralisasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota diketahui bahwa berdasarkan nilai probabilitas (uji simultan) hanya satu persamaan regresi yang nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu persamaan dengan paritas daya beli sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk persamaan regresi lainnya memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh variabel independen (DAU, DAK, DBH dan PAD) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (indikator pembangunan) kecuali paritas daya beli pada taraf kepercayaan 95%.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Ketimpangan Regional, Ekonomi

Pendahuluan

Kondisi nasional terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997 telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat Indonesia. Krisis kepercayaan ini tumbuh saat situasi sosial politik dan keamanan di berbagai daerah tidak stabil dan didorong oleh keinginan daerah untuk menolak pelaksanaan sistem pemerintahan yang masih bersifat sentralistik pada saat itu. Menurut Hadi (2001), kebijakan pembangunan yang sentralistik dan menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi serta penciptaan kondisi politik dan keamanan yang sangat terkendali secara parsial ternyata telah menambah ketimpangan antar wilayah.

Kebijakan pemerintah yang sentralistik tersebut didukung oleh undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tersirat bahwa peranan pemerintah pusat akan semakin besar karena pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber penerimaan daerah termasuk sumber penerimaan yang berasal dari potensi sumber daya alam seperti, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Dengan keadaan ini maka mendorong timbulnya ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah penghasil sumber daya alam. Selain itu, karena belum terukurnya mekanisme pengalokasian transfer kepada daerah menyebabkan timbulnya juga ketimpangan horizontal antara satu daerah dengan daerah lain, terutama antara daerah-daerah yang berada di Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia (Hermawan, 2007).

Untuk mengatasi kondisi yang telah terbentuk ini, pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah pada tahun 1999, yaitu; 1) Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan 2) Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini memiliki empat hal yang mengalami perubahan, antara lain; a) konsep desentralisasi lebih mengemuka dibandingkan dengan konsep dekonsentrasi, b) masalah pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah lebih bersifat horizontal dibandingkan vertikal, c) pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dan d) kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh ke daerah.

Berdasarkan amanat undang-undang no 25 tahun 1999, kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, nasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab serta memperkecil perbedaan pembangunan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang. Dengan demikian melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan akan terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dengan bekal kemampuan keuangan yang relatif sama tersebut diharapkan setiap daerah dapat membangun daerahnya dengan tingkat perkembangan yang relatif sama pula (Hermawan, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai oleh desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Tujuannya

untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (mengoreksi ketimpangan vertikal serta ketimpangan horizontal). Koreksi vertikal dilakukan melalui pengalokasian Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Sumber Daya Alam, dan koreksi horizontal dilakukan melalui pengalokasian DAU. Dengan adanya BHP, daerah-daerah yang memiliki potensi pajak dan sumber daya alam yang besar akan memperoleh penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang cukup besar, sehingga proporsi perolehan dari DAU akan relatif kecil. Sebaliknya, daerah-daerah yang tidak memiliki potensi pajak dan potensi SDA akan mendapatkan proporsi DAU yang relatif lebih besar daripada daerah yang memiliki potensi pajak dan potensi SDA. Provinsi Papua Barat yang berdiri sejak tahun 2001 juga salah satu penerima DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil. Kajian perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pengalokasian komponen-komponennya mempengaruhi pemerataan kesejahteraan penduduk Kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah seperti diuraikan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstraksi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah

adanya amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004, mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah menjadi sasaran utamanya (Brodjonegoro, 2004). Di sisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar porsi bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan perluasan total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah, praktek soft budget constraint dari sisi pemerintah pusat yang juga disebabkan oleh lambatnya reformasi pajak daerah.

Menurut Sato (2004), motif utama dilakukannya desentralisasi di negara sedang berkembang adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah dianggap lebih cocok membuat perencanaan pembangunan lokal dan melaksanakannya, dibandingkan perencanaan pembangunan yang tersentralisasi. Masyarakat lokal akan lebih menghargai upaya mengembangkan perekonomian lokal yang dilakukan pemerintah lokalnya, dibandingkan oleh pemerintah pusat. Meskipun begitu, timbul kekhawatiran bahwa dengan kekuasaan pemerintah daerah yang begitu besar, pemerintah daerah akan rentan terhadap korupsi dan praktek rent-seeking.

Desentralisasi dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah yang lamban. Desentralisasi disetujui dengan asumsi bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemerintah pusat. Namun, desentralisasi ini malah memunculkan praktek rent-seeking dari sekelompok orang karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas dalam pelaksanaannya (Sato, 2004). Persaingan antar pemerintah daerah yang proporsional juga akan membantu menciptakan sistem insentif yang akan menuju pada fokus pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat, dan tidak semata kebijakan populis yang berumur pendek.

Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan dapat meningkatkan etos kerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita.

Sumber Pendapatan Daerah

Bentuk dan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semenjak berlakunya otonomi daerah meliputi hubungan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pinjaman daerah. Penyelenggara-

an urusan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi didanai melalui APBD, urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur/bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai melalui APBN, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan didanai atas beban anggaran pemerintah yang menugaskan. Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah sesuai UU 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dengan demikian sumber pendanaan yang berasal dari dana perimbangan masih merupakan komponen yang paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber pendanaan yang lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat di dalam memperoleh dana bagi pelaksanaan pembangunan.

Menurut Mualim (2010), pengertian dari DBH, DAU dan DAK adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka prosentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula. UU No. 33 Tahun 2004 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*).

Menurut Sukatandel (2007), definisi dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil
Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Untuk

mengurangi kesenjangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

b. Dana Alokasi Umum

Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah. Jumlah total DAU dialokasikan sebesar minimal 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN (Pasal 27 UU 33/2004). Dengan dana perimbangan ini, diharapkan akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Berdasarkan konsep *fiscal gap* ini, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif lebih besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang besar.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan di dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000, DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Kriteria kebutuhan khusus tersebut meliputi, pertama, kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus alokasi umum, kedua, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, dan ketiga, kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan kriteria kebutuhan khusus tersebut, DAK dibedakan

atas DAK dana reboisasi (DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR).

Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*)

“Economic Development is Growth Plus Change” yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak. Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Jika kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat dari satu periode ke periode lainnya, ini disebabkan oleh diberdayakannya faktor-faktor produksi yang selalu meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan akan berkembang (Mansim, 2010).

Sumberdaya Dasar

Sumberdaya dasar adalah sumberdaya yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah yang ada dan ditemukan serta yang bersumber di dalam wilayah otoritas yang bersangkutan. Sumberdaya dasar merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Sumberdaya dasar adalah sumberdaya alam yang terkait dengan potensi fisik wilayah, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kiat manajemen/pengelolaan yang berimbang dan berkelanjutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam peningkatan produktivitasnya. Keberhasilan pengelolaan dengan berpijak pada kaidah kelestarian lingkungan dan berkelanjutan akan dapat

menjamin terhadap meningkatnya masukan daerah.

Manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan. Sumberdaya manusia merupakan kunci sukses dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam skala kecil, menengah maupun sedang. Dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut maka diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas di tingkat regional untuk masa-masa sekarang dan yang akan datang perlu dilakukan dan perlu memperoleh/mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya sehingga potensinya dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Pembangunan regional bukanlah membangun fisik daerah semata-mata, melainkan inti pembangunan daerah adalah membangun sumberdaya manusia (Christanto, 2002).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai bagian dari pembangunan daerah, pembangunan sumberdaya manusia di daerah selalu melibatkan kepentingan masyarakat lokal, artinya pembangunan yang dilakukan bertujuan akhir terutama untuk menyejahterakan masyarakat di daerah. Pembangunan sumberdaya manusia ini kemudian dapat diukur dengan menggunakan suatu indeks yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia.

The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan terakhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama, melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Jalur kedua, adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga.

Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain serupa. Dalam tatanan desentralisasi atau otonomi daerah, tercapainya peningkatan taraf kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas dari manusianya. Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang ada di daerah tidak bisa dilakukan dengan baik apabila tidak didukung oleh data-data atau indikator-indikator pembangunan Dewasa ini untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia, UNDP mengembangkan suatu indeks komposit yang memasukkan unsur keberhasilan pembangunan ekonomi dan keberhasilan sosial yang selanjutnya disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan angka rata-rata indeks dari tiga komponen IPM yaitu indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta indeks kemampuan daya beli (PPP).

Provinsi Papua Barat dengan sumberdaya alam yang cukup kaya berusaha untuk menempatkan penduduk sebagai tujuan sebenarnya dari seluruh kegiatan pembangunan. Maka pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat memandang semua program kegiatan pembangunan harus dipusatkan pada upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemajuan (*achievement*), kapabilitas (*capability*), kebebasan (*freedom*) manusia sesuai dengan arah reformasi. Untuk itu indikator komposit IPM dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat, merencanakan dan menganalisis pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. UNDP mengelompokkan IPM dengan kategori sebagai berikut (Todaro, 2000):

Tabel 1. Kategori IPM

Kategori IPM	Nilai IPM
IPM tinggi	lebih dari 80
IPM menengah atas	66,00 – 79,99
IPM menengah bawah	50,00 – 65,99
IPM bawah	Kurang dari 50,00

Sumber: Todaro, 2000.

Metode Penghitungan IPM

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

dimana:

X_1 = Harapan Hidup

X_2 = Pendidikan

X_3 = Daya Beli

Metode Penghitungan Indeks X_{ij}

$$\text{Indeks } X_{ij} = (X_{ij} - X_{i-\min}) / (X_{i-\max} - X_{i-\min})$$

X_{ij} : indikator ke- i dari daerah ke- j

$X_{i-\min}$: nilai minimum dari X_i

$X_{i-\max}$: nilai maksimum dari X_i

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasannya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh teman empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini.

Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pembangunan daerah yang dilakukan bergantung pada jumlah penerimaan transfer ke daerah karena belanja daerah sangat bergantung pada besarnya porsi penerimaan transfer tersebut.

Model Penelitian

Dari berbagai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat diperoleh gambaran adanya hubungan pengaruh antara berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hubungan ini ditunjukkan dengan model seperti disajikan dalam gambar 1.

Metodologi

Sampel dan Data

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data panel. Data terdiri dari data time series dan *cross-section*. Terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat.

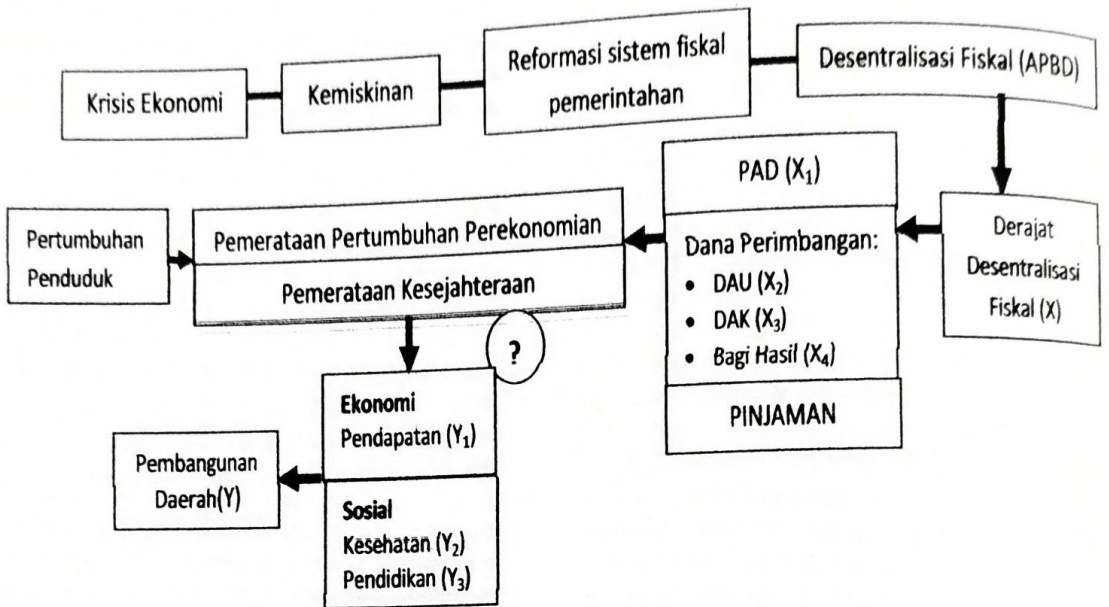
Alat Analisis

Analisis Deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang DAU, DAK, DBH, PAD dan PDRB per Kapita.

Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh prosentase masing-masing komponen dana desentralisasi terhadap beberapa indikator pembangunan daerah, terutama kesehatan dan pendidikan. Pengu-



Keterangan:

- = hubungan pengaruh
- = hubungan

Gambar 1. Kerangka Hubungan Variabel

ujian terhadap model akan menggunakan uji asumsi klasik, diantaranya:

- a) Uji Multikolinearitas
- b) Uji Normalitas
- c) Uji Autokorelasi
- d) Uji Heterokedastisitas

Konsep Operasional Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Sementara untuk variabel tidak bebasnya adalah variabel pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Beberapa variabel yang termasuk dalam analisis penelitian ini perlu didefinisikan, sehingga terdapat kesamaan persepsi terhadap arti variabel-variabel tersebut. Untuk analisis regresi nilai DAU, DAK, DBH dan PAD menggunakan derajat desentralisasi.

- 1) Dana Desentralisasi Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, yang terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun.
 - Bagi Hasil Bukan Pajak. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun.
 - Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun.
- 2) Pertumbuhan ekonomi adalah laju perkembangan ekonomi daerah per tahun. Variabel ini diukur berdasarkan rasio PDRB riil per kapita dengan menggunakan tahun dasar 2010.
 - 3) Ketimpangan daerah
Analisis Ketimpangan Ekonomi antar-Daerah digunakan 2 jenis analisis yakni:
 - a. Indeks Ketimpangan Williamson merupakan formulasi yang dipergunakan untuk menghitung ketimpangan (dispa-

ritas) sumber-sumber penerimaan APBD antar daerah. Nilai I_w berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila I_w sama dengan 0 maka tidak ada ketimpangan penerimaan antar daerah. Menurut Syafrizal (1997), indeks Williamson merupakan analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 x \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

dimana:

- I_w = Indeks Williamson
- y_i = PDRB per kapita di Kabupaten i
- \bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Papua Barat
- f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
- n = Jumlah penduduk akumulatif Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Nilai indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Rentang nilai yang dipergunakan dalam indeks Williamson adalah:

1. Jika nilai I_w antara 0 – 0,25 → distribusi pendapatan penduduk merata sangat baik.
2. Jika nilai I_w antara 0,25 – 0,50 → distribusi pendapatan penduduk merata moderat.
3. Jika nilai I_w antara 0,51 – 0,75 → distribusi pendapatan penduduk timpang.
4. Jika nilai I_w antara 0,76 – 1,00 → distribusi pendapatan penduduk sangat timpang.
5. Jika nilai I_w antara >1,00 → distribusi pendapatan penduduk ketimpangan maksimum.

Indikator I_w menunjukkan bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang makin melebar.

- b. Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun rumusan dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut (L.G. Ying, 2000):

$$I_y = \sum \left(\frac{y_i}{Y} \right) x \log \left[\frac{\left(\frac{y_i}{Y} \right)}{\left(\frac{x_i}{X} \right)} \right]$$

dimana:

- I_y = indeks entropi Theil
- y_i = PDRB per kapita kabupaten i
- Y = rata-rata PDRB perkapita Provinsi Papua Barat
- x_i = jumlah penduduk kabupaten i
- X = jumlah penduduk Provinsi Papua Barat

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.

- 4) Derajat Desentralisasi Fiskal
Spesifikasi model pengukuran yang digunakan mengikuti konsep Musgrave dan Musgrave (1980) mengukur derajat desentralisasi fiskal, sebagai berikut:

$$D_{DF} = \frac{D_i}{TPD}$$

dimana:

- D_{DF} = Derajat desentralisasi fiskal
 - D_i = Dana alokasi
 - TPD = Total Penerimaan Daerah
- Semakin besar nilai desentralisasi fiskal, menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, apabila semakin kecil nilainya akan menunjukkan semakin rendah derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Model Regresi Linier

Model Pengaruh Desentralisasi Terhadap:	Persamaan Regresi
Perkembangan perekonomian	$\text{Entropy}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$ $\text{PDRB per kapita}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$
Perkembangan IPM	$\text{IPM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$
Perkembangan paritas daya beli	$\text{PDB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$
Perkembangan pendidikan	$\text{AMH}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$ $\text{RLS}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$
Perkembangan kesehatan	$\text{AHH}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{TPit} + \beta_2 \text{DAK}_{TPit} + \beta_3 \text{DBH}_{TPit} + \beta_4 \text{PAD}_{TPit} + e_{it}$

Dimana:

- Entropy = Indeks Entropi Theil
- PDRBper kapita = PDRB per kapita
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PDB = Paritas Daya Beli
- AMH = Angka Melek Huruf
- RLS = Rata-Rata Lama Sekolah
- AHH = Angka Harapan Hidup
- DAUTP = Dana Alokasi Umum per Total Pendapatan
- DAKTP = Dana Alokasi Khusus per Total Pendapatan
- DBHTP = Dana Bagi Hasil per Total Pendapatan
- PADTP = Pendapatan Asli Daerah per Total Pendapatan

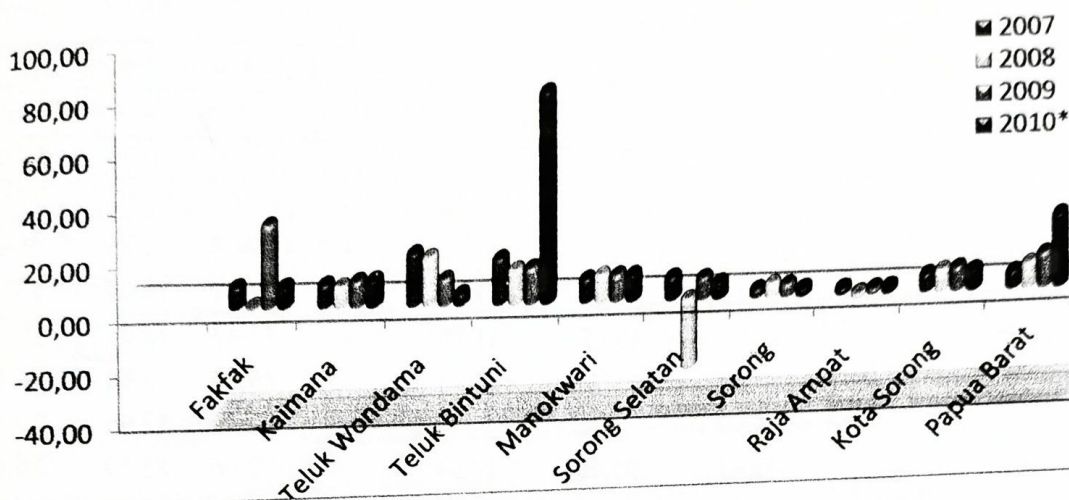
Kabupaten Teluk Bintuni juga dirasakan oleh Provinsi Papua Barat. Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan Provinsi pada tahun 2010 juga meningkat secara signifikan. Sementara itu, Kabupaten Sorong Selatan justru memiliki laju pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008.

Jika dilihat nilai PDRB per Kabupaten/Kota dari tahun 2007 hingga 2010, secara umum nilai PDRB per tahun setiap Kabupaten /Kota cenderung stabil kecuali untuk kabupaten Teluk Bintuni yang meningkat dua kali lipat ditahun 2010. Diharapkan semakin besar derajat desentralisasi di Kabupaten/Kota akan meningkatkan nilai PDRB karena ada dukungan dana untuk mengelola aktivitas setiap sektor.

Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Barat berbeda-beda dan di beberapa Kabupaten pertumbuhannya sangat berfluktuasi. Jika dilihat dari grafik pertumbuhan (gambar 2) diketahui bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki laju pertumbuhan yang meningkat secara dramatis pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan Kabupaten tersebut memiliki sumbangan terbesar dari sektor migas. Sumbangan sektor migas yang besar dari

Menurut Fauziah (2008), dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengindikasikan bahwa desentralisasi dari sisi penerimaan mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan desentralisasi pengeluaran tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di daerah. Penyebab dari desentralisasi penerimaan memperlambat pertumbuhan diduga sebagai akibat pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan PAD bukannya PDRB, sehingga mengabaikan perbaikan iklim investasi daerah.



Sumber: Data diolah, 2011.

Gambar 2.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 - 2011 (Juta Rupiah)

Tabel 3.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun / Year 2007 - 2010 (Juta Rupiah/ Million Rupiahs)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	1,073,137.00	1,070,547.26	1,398,727.17	1,508,373.62
2.Kaimana	685,968.06	737,751.08	808,314.30	888,693.73
3.Teluk Wondama	291,331.07	344,505.13	378,257.79	394,233.86
4.Teluk Bintuni	1,561,515.20	1,772,155.95	3,192,029.31	8,675,044.49
5.Manokwari	2,206,847.39	2,431,872.94	2,677,210.30	2,677,210.30
6.Sorong Selatan	407,500.89	383,093.58	370,230.35	392,841.54
7.Sorong	5,454,933.22	5,726,458.22	5,989,767.70	6,165,670.09
8.Raja Ampat	1,087,162.43	1,073,842.05	1,094,252.05	1,121,456.20
9. Kota Sorong	2,527,877.14	2,730,556.18	2,970,224.44	3,198,606.99
Papua Barat	16,171,069.79	17,673,879.03	19,963,551.95	25,514,260.75

Sumber: Papua Barat Dalam Angka 2007-2011 (diolah).

Tabel 4.
Pertumbuhan dan laju pertumbuhan PAD per Kapita

Daerah	Pertumbuhan				Laju Pertumbuhan			
	2007	2008	2009	2010*	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	-	10.43	191.73	28.22	-	55.44	90.04	68.49
2.Kaimana	-	2.53	353.85	56.92	-	39.62	93.97	77.61
3.Teluk Wondama	-	2,625.27	(25.87)	34.58	-	99.07	76.86	71.20
4.Teluk Bintuni	-	86.41	50.23	117.77	-	82.51	76.04	85.75
5.Manokwari	-	40.97	39.68	31.78	-	73.42	73.01	70.08
6.Sorong Selatan	-	120.80	(22.76)	100.93	-	86.00	73.68	84.19
7.Sorong	-	67.59	8.54	66.88	-	79.69	52.96	79.56
8.Raja Ampat	-	38.63	95.40	10.94	-	72.66	83.59	56.04
9. Kota Sorong	-	(1.00)	48.45	(9.34)	-	31.68	75.58	56.66

Sumber: Data diolah, 2011.

Tabel 5.
Pertumbuhan dan laju pertumbuhan DAU per Kapita

Daerah	Pertumbuhan				Laju Pertumbuhan			
	2007	2008	2009	2010*	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	-	6.67	(4.15)	(9.14)	-	50.01	45.61	56.32
2.Kaimana	-	15.87	(11.14)	(0.85)	-	60.83	59.51	30.46
3.Teluk Wondama	-	17.99	(2.64)	0.45	-	62.49	40.57	25.86
4.Teluk Bintuni	-	(12.35)	15.57	(6.99)	-	61.27	60.58	52.36
5.Manokwari	-	8.18	(37.15)	(2.57)	-	52.43	87.68	40.32
6.Sorong Selatan	-	3.22	18.98	(1.60)	-	42.03	63.20	35.72
7.Sorong	-	11.10	4.31	(1.48)	-	56.22	45.08	34.99
8.Raja Ampat	-	(1.49)	(1.67)	(9.97)	-	35.09	36.10	57.69
9. Kota Sorong	-	6.67	(4.15)	(9.14)	-	50.01	45.61	56.32

Sumber: Data diolah, 2011.

Kabupaten Teluk Wondama memiliki pertumbuhan yang sangat cepat ditahun 2008 tetapi menurun bahkan negatif di tahun 2009. Tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan di tiap-tiap daerah menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan nilai PAD belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah yang berwenang. Laju pertumbuhan PAD yang cukup stabil ditunjukkan oleh Kabupaten Manokwari (Tabel 4).

Tabel 5 menunjukkan tingkat pertumbuhan dan laju pertumbuhan DAU disetiap Kabupaten/Kota. Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah. Jumlah total DAU dialokasikan sebesar minimal 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN (Pasal 27 UU 33/2004).

Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat memiliki tingkat pertumbuhan negatif pada tahun 2010, kecuali Kabupaten Teluk Wondama (Tabel 5). Sedangkan untuk laju pertumbuhannya, Kabupaten Manokwari yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 87,68%. Nilai negatif menunjukkan semakin berkurangnya total DAU yang dialokasikan. Hal ini dapat berdampak kepada terhambatnya beberapa program pembangunan karena kurangnya pembiayaan.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan di dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000, DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Dari tabel 6 diketahui bahwa hanya Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki nilai pertumbuhan positif, tetapi proporsinya termasuk kategori rendah.

Tabel 6.
Pertumbuhan dan laju pertumbuhan DAK per Kapita

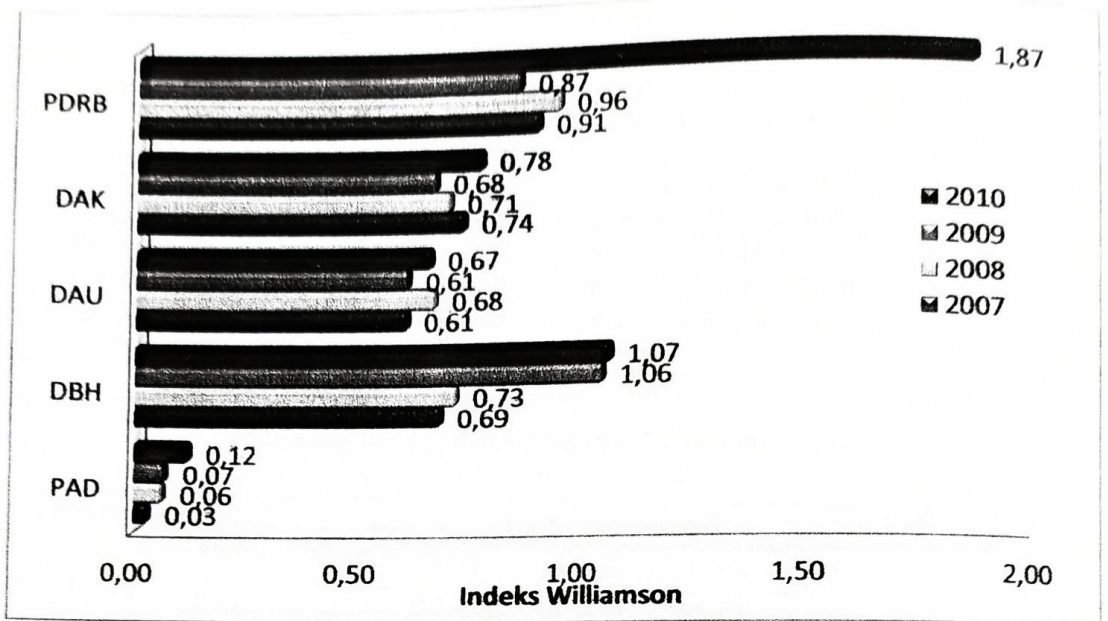
Daerah	Pertumbuhan				Laju Pertumbuhan			
	2007	2008	2009	2010*	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	-	20.24	(12.78)	(33.59)	-	64.05	61.87	84.33
2.Kaimana	-	9.09	(11.41)	1.66	-	53.73	59.91	35.75
3.Teluk Wondama	-	11.94	(24.79)	(22.95)	-	57.15	75.77	73.87
4.Teluk Bintuni	-	12.05	(7.57)	(12.28)	-	57.26	53.50	61.17
5.Manokwari	-	22.72	(18.03)	(2.83)	-	65.60	68.48	41.32
6.Sorong Selatan	-	12.71	(19.41)	4.75	-	57.95	70.05	46.14
7.Sorong	-	15.66	9.24	(4.53)	-	60.66	53.94	46.66
8.Raja Ampat	-	13.92	4.60	(18.72)	-	59.13	45.78	69.27
9. Kota Sorong	-	20.79	(0.44)	(61.61)	-	64.41	25.74	112.56

Sumber: Data diolah, 2011.

Tabel 7.
Pertumbuhan dan laju pertumbuhan DBH per Kapita

Daerah	Pertumbuhan				Laju Pertumbuhan			
	2007	2008	2009	2010*	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	-	48.38	6.86	2.78	-	75.57	50.34	40.57
2.Kaimana	-	58.55	8.51	40.66	-	77.96	52.92	73.32
3.Teluk Wondama	-	185.24	36.66	(27.14)	-	89.77	71.97	78.13
4.Teluk Bintuni	-	40.00	88.60	6.68	-	73.11	82.79	50.02
5.Manokwari	-	9.42	17.75	6.95	-	54.17	62.31	50.50
6.Sorong Selatan	-	34.60	(84.49)	838.88	-	71.21	152.78	97.22
7.Sorong	-	23.61	31.85	(8.63)	-	66.11	70.11	55.44
8.Raja Ampat	-	51.58	81.78	(6.91)	-	76.38	81.90	52.20
9. Kota Sorong	-	20.58	29.10	(40.08)	-	64.28	68.90	90.44

Sumber: Data diolah, 2011.



Sumber: Data diolah, 2011.

Gambar 3.
Indeks Williamson

Tabel 8.
Indeks Entropi Theil

Daerah	2007	2008	2009	2010*
1.Fakfak	8.34	8.09	8.84	9.46
2.Kaimana	10.23	10.28	10.39	10.43
3.Teluk Wondama	11.56	11.97	12.15	11.92
4.Teluk Bintuni	11.47	11.67	13.81	20.01
5.Manokwari	3.71	3.85	3.73	2.41
6.Sorong Selatan	5.20	4.71	4.14	8.46
7.Sorong	11.67	11.61	11.65	15.58
8.Raja Ampat	12.18	11.91	11.80	12.33
9. Kota Sorong	4.42	4.47	4.35	3.10
Papua Barat	8.75	8.73	8.98	10.41

Sumber: Data diolah, 2011.

Tabel 7 menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana ini dialokasikan kepada daerah dengan angka prosentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil (by origin) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk Kabupaten Sorong Selatan, pertumbuhan DBH-nya sangat tinggi di tahun 2010 (838,88%), searah dengan laju pertumbuhan di Kabupaten Sorong Selatan yang mencapai 97,22%.

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan formulasi yang dipergunakan untuk menghitung ketimpangan (disparitas) sumber-sumber penerimaan APBD antar daerah. Hasil perhitungan Indeks Williamson per tahun untuk masing-masing komponen dana desentralisasi menunjukkan bahwa rata-rata indeks untuk DAU, DAK dan DBH berada pada kisaran antara 0,51 – 0,75. Artinya, distribusi pendapatan penduduk timpang. Sementara untuk DBH tahu 2009 dan 2010, indeksnya > 1. Artinya, ketimpangannya mencapai maksimum. Distribusi yang timpang ini terjadi karena tidak meratanya distribusi penerimaan dan pengalokasian pengeluaran.

Indeks entropi Theil menunjukkan besarnya ketimpangan antar daerah. Semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya

apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan. Jika dilihat dari nilai indeks entropy pada tabel 8, diketahui bahwa hanya Kabupaten Manokwari yang memiliki nilai indeks terkecil dan cenderung menurun hingga tahun 2010 diikuti oleh Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari merupakan Kabupaten yang lebih dulu ada sehingga pembangunan daerah yang dilakukan lebih sistematis dan terarah dibandingkan dengan Kabupaten yang baru berdiri. Nilai indeks terbesar adalah di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 (20,01).

Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk melihat hubungan pengaruh dari komponen dana desentralisasi (dana perimbangan dan PAD) terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat, terutama pendidikan dan kesehatan. Tabel 9 menunjukkan nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dari setiap model persamaan regresi yang digunakan. Nilai koefisien korelasi setiap model lebih dari 0,50 kecuali untuk persamaan regresi dengan paritas daya beli sebagai variabel terikat. Artinya hubungan antara variabel dependen dan independennya adalah sedang. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah.

Tabel 9.
Deskripsi Statistik

Model Pengaruh Desentralisasi Terhadap:	R	R2	Radj.2	Std. Error of the Estimate
1. Perkembangan perekonomian				
a. PDRB	0,845	0,714	0,677	1,876
b. IE	0,642	0,412	0,336	3,319
2. Perkembangan IPM	0,653	0,426	0,352	3,108
3. Perkembangan paritas daya beli	0,455	0,207	0,104	17,88
4. Perkembangan pendidikan				
a. AMH	0,551	0,304	0,214	5,205
b. RLS	0,645	0,416	0,341	0,982
5. Perkembangankesehatan (AHH)	0,761	0,578	0,524	1,224

Sumber: Data diolah, 2011.

Koefisien determinasi yang disesuaikan mengindikasikan kemampuan seluruh variabel bebas menjelaskan variasi dari variabel tak bebas pada taraf kepercayaan yang ditentukan. Nilai R^2_{adj} yang lebih tinggi dibanding persamaan lainnya ditunjukkan oleh persamaan ke 1a. diikuti oleh persamaan ke 5.

Uji Asumsi Klasik

Analisis lanjutan dilakukan pada masing-masing variabel yang digunakan dalam persamaan regresi diuji untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain multikolinearitas, autokorelasi, normalitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 10 menunjukkan nilai VIF yang lebih kecil dari lima. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel

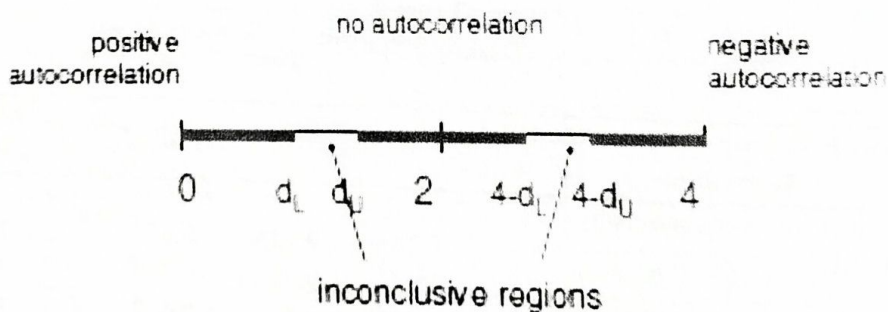
bebas yang digunakan dalam model regresi.

Tabel 11 menunjukkan hasil olah data untuk uji Durbin-Watson (DW). Jumlah observasi sebanyak 36 observasi dan jumlah parameter adalah empat. Dengan demikian nilai kritis Durbin-Watson pada taraf nyata 0,05 adalah $d_l=1,29$ dan $d_u=1,65$. $4-d_l=4-1,29=2,71$ dan $4-d_u=4-1,65=2,35$. Selanjutnya nilai DW statistik dibandingkan dengan DW kritis dan diperoleh hasil bahwa hanya model 1a yang tidak terdapat autokorelasi karena nilai DW statistik (1,876) > dari DW kritisnya (1,65). Sedangkan untuk model regresi yang lainnya diperoleh hasil bahwa terjadi autokorelasi positif. Karena nilai p tidak diketahui, maka perbaikan masalah autokorelasinya menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Squares) dengan asumsi BLUE.

Tabel 10.
Multikolinearitas (VIF)

Model Regresi/Variabel	1a.	1b.	2.	3.	4a.	4b.	5.
DAUTP	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987
DAKTP	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687
DBHTP	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
PADTP	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633

Sumber: Data diolah, 2011.



Gambar 4.
Pengambilan Keputusan untuk Uji DW.

Tabel 11.
Autokorelasi

Model Pengaruh Desentralisasi Terhadap:	Durbin- Watson
1. Perkembangan perekonomian	
a. PDRB	1,876
b. IE	0,747
2. Perkembangan IPM	0,712
3. Perkembangan paritas daya beli	0,675
4. Perkembangan pendidikan	
a. AMH	0,458
b. RLS	0,551
5. Perkembangan kesehatan (AHH)	0,933

Sumber: Data diolah, 2011.

Distribusi data variabel dependen terhadap residualnya ditampilkan dalam gambar 5 (lampiran). Jika titik-titik yang ada mendekati atau berada dekat dengan garis diagonal dapat diartikan bahwa data variabel tersebut berdistribusi normal dan tidak melanggar aturan asumsi klasik. Dari gambar 5 diketahui bahwa data plot terletak disekitar garis diagonal. Dengan demikian data dapat diasumsikan menyebar normal dan layak digunakan.

Untuk uji heteroskedastisitas digunakan grafik yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan residualnya. Hasilnya disajikan dalam gambar 6 (lampiran). Jika scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan distribusinya seragam disekitar titik nol residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi pelanggaran asumsi. Dari gambar 6 diketahui bahwa secara umum gambar scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu, tetapi terdapat sedikit data yang letaknya jauh dari titik nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 12.
Parameter Regresi

Model Regresi/ Parameter	1a.	1b.	2.	3.	4a.	4b.	5.
(Constant)	28,789	12,023	64,716	588,242	85,778	6,715	66,573
DAUTP	-41,381	-6,292	6,161	12,224	9,489	0,566	4,859
DAKTP	-103,465	-15,205	-14,909	-116,250	2,058	6,399	-20,115
DBHTP	139,945	18,669	-13,051	-19,025	-22,062	-4,328	-6,257
PADTP	214,810	-70,280	153,474	504,972	158,898	52,089	73,112

Sumber: Data diolah, 2011.

Tabel 13.
Signifikansi Hasil Uji t

Model Regresi	1a.	1b.	2.	3.	4a.	4b.	5.
(Constant)	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DAUTP	0,104	0,207	0,188	0,646	0,225	0,698	0,011
DAKTP	0,508	0,622	0,606	0,486	0,966	0,485	0,084
DBHTP	0,000	0,000	0,002	0,392	0,002	0,001	0,000
PADTP	0,311	0,098	0,000	0,030	0,020	0,000	0,000

Sumber: Data diolah, 2011.

Tabel 12 menunjukkan nilai parameter dari setiap model regresi yang digunakan dan tabel 13 menunjukkan signifikansi uji t. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Hasilnya ada beberapa variabel memiliki nilai parameter yang negatif dan tidak searah seperti yang diasumsikan. Variabel yang signifikan mempengaruhi perkembangan indikator pembangunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah sangat signifikan mempengaruhi beberapa indikator pembangunan antara lain IPM, paritas daya beli, AMH, RLS dan AHH. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak satupun mempengaruhi indikator pembangunan pada taraf kepercayaan 95%.

Tabel 14.
Uji F

Model Pengaruh Desentralisasi Terhadap:	FHitung	Sig.
1. Perkembangan perekonomian		
a. PDRB	19,354	0,000
b. IE	5,423	0,002
2. Perkembangan IPM	5,755	0,001
3. Perkembangan paritas daya beli	2,020	0,116
4. Perkembangan pendidikan		
a. AMH	3,387	0,021
b. RLS	5,527	0,002
5. Perkembangan kesehatan (AHH)	10,635	0,000

Sumber: Data diolah, 2011.

Selanjutnya, model diuji dengan menggunakan uji F yang akan menjelaskan apakah variabel independen yang digunakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Tabel 14 menunjukkan hasil uji F dan nilai probabilitasnya. Berdasarkan nilai probabilitasnya satu persamaan regresi yang nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu persamaan ke-3 dengan variabel dependen paritas

daya beli. Sedangkan untuk persamaan regresi lainnya memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh variabel independen (DAU, DAK, DBH dan PAD) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (indikator pembangunan) pada taraf kepercayaan 95%.

Penutup

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Terdapat ketimpangan distribusi dana perimbangan dan PAD antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat. Tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan di tiap-tiap daerah menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan nilai PAD belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah yang berwenang. Laju pertumbuhan PAD yang cukup stabil hanya ada di Kabupaten Manokwari.
2. Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat memiliki tingkat pertumbuhan DAU negatif pada tahun 2010, kecuali Kabupaten Teluk Wondama. Nilai negatif menunjukkan semakin berkurangnya total DAU yang dialokasikan. Hal ini dapat berdampak kepada terhambatnya beberapa program pembangunan karena kurangnya pembiayaan. Untuk DAK Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, hanya Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki nilai pertumbuhan positif. Untuk Kabupaten Sorong Selatan, pertumbuhan DBH-nya sangat tinggi di tahun 2010 (838,88%), searah dengan laju pertumbuhan di Kabupaten Sorong Selatan yang mencapai 97,22%.
3. Dari tujuh model regresi untuk melihat pengaruh dana desentralisasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota diketahui bahwa berdasarkan nilai probabilitas (uji F) hanya satu persamaan regresi yang nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu persamaan ke-3 dengan variabel dependen paritas daya beli. Sedangkan untuk persamaan regresi lainnya memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh variabel independen (DAU, DAK, DBH dan PAD) secara bersama-sama mempe-

ngaruhi variabel dependen (indikator pembangunan) kecuali paritas daya beli pada taraf kepercayaan 95%.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekku Depkeu. Badan Pusat Statistik (BPS), 2007, Papua Barat Dalam Angka 2007, Badan Pusat Statistik, Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2008. *Papua Barat Dalam Angka 2008*, Badan Pusat Statistik. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2009. *Papua Barat Dalam Angka 2009*, Badan Pusat Statistik. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010. *Papua Barat Dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2011. *Papua Barat Dalam Angka 2011*, Badan Pusat Statistik. Papua Barat.
- Boediono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM. Yogyakarta.
- Brodjonegoro, Bambang, 2004, "Indonesia Decentralization After the Revised Laws: Toward A Better Future?", presented at the International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited, Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan.
- Caska dan RM. Riadi, 2008, *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Papua Riau*, Jurnal Industri dan Perkotaan, Volume XII 1630 Nomor 21/Februari 2008.
- Christanto J. 2002. "Otonomi Daerah dan Skenario Indonesia 2010 dalam Konteks Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Kewilayahan (Regional Development Approach)". <http://rudycct.tripod.com>.
- Fauziah (2008), "Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia", Journal of Economics and Finance Indonesia, Jakarta.
- Hadi, S, 2001, *Studi Dampak Kebijakan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar-Wilayah (Pendekatan Model Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi)*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor (Tidak Diterbitkan).
- Hakim, A, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159.
- Hermawan, Dudi, 2007, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kab/Kota Di Provinsi Banten)*, Institut Pertanian Bogor.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. *Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35: 159-174.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.
- Mansim, Naftali, 2010, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Papua Barat*. Lensa Ekonomi, Vol4, No.2.
- Mualim, Mus, 2010, *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten/ Kota Di Provinsi Papua Barat*. Lensa Ekonomi, Vol.4, No.2.
- Musgrave & Musgrave, 1980. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.

- Sato, Motohiro (2004),” *Fiscal Decentralization in Asia Revisited : A Theoretical Foundation, presented at the International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited*, Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan.
- Sidik M, Brodjonegoro B, Mahi R, Simanjuntak R, 2002, *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sukatendel, Ferdinan, 2007, *Analisis Keterkaitan Alokasi Anggaran Dan Sektor Unggulan Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor*, Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, Sadono, 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Ketiga. PT.Raja Grafinso Persada. Jakarta.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Syafrizal, 1997, “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*”, Prisma, LP3ES, Nomor 3, 27-38.
- Todaro, M.P. 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, Penerbit: Anfaka Perdana, Surabaya.
- Ying, L.G. 2000. *China's Changing Regional Disparities during the Reform Period*. Journal Economic Geography, XXIV (7).